



KPU KOTA SOAL PEMILIH PILPRES MENDATANG

Warga Yang Belum Terdaftar Diminta Proaktif

YOGYA (KR) - KPU Kota Yogyakarta meminta masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu Legislatif (Pileg) lalu dan tidak dapat menconteng, untuk proaktif segera mendatangi RT/RW di wilayahnya, sehingga dalam Pilpres mendatang dapat menggunakan hak pilihnya.

Anggota KPU Kota Yogyakarta Titok Haryanto mengatakan, untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang, KPU Kota Yogyakarta akan menggunakan data yang tercantum dalam DPT Pemilu Legislatif (Pileg) sebagai Data Pemilih Sementara (DPS). Selain itu juga akan ditambahkan data pemilih tambahan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Kota Yogyakarta.

"Jadi data DPT Pileg dan DKPS yang akan dijadikan DPS Pilpres. Untuk itu, bagi yang kemarin belum mendaftar, bisa aktif mendatangi RT/RW, sehingga bisa terdaftar," ungkap Titok di kantor KPU kota, Senin (13/4).

Dikatakan, pihaknya belum mengetahui berapa penambahan jumlah pemilih untuk Kota Yogyakarta. Dalam aturan disebutkan, bahwa 28 April mendatang, DPT sudah harus diumumkan. Namun kemungkinan, waktu tersebut akan diundur hingga 10 Mei. Selain pemilih tambahan, juga akan ada koreksi dari data lama yang ada di DPT Pileg, seperti pemilih yang meninggal dunia, data ganda ataupun pindah domisili.

"Saya kira waktu hingga 10 Mei itu mencukupi untuk memperbaiki data. Syaratnya hanya itu, masyarakat yang belum terdaftar agar lebih proaktif," ungkapnya.

Titok mengatakan, untuk pendataan Pilpres ini ada sekitar 500 Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP) yang dilibatkan.

"Namun untuk data Pilpres ini, ada belasan PPDP saat Pileg yang terpaksa diganti, karena terdapat beberapa kesalahan persepsi khususnya mengenai pindah domisili, sehingga banyak pemilih yang tidak terdaftar. Pindah domisili seharusnya dipahami sebagai pindah kependudukan, bukan sekadar pindah tempat tinggal," ujarnya.

Anggota KPU Propinsi DIY, Supardiyo mengharapkan untuk pendataan pemilihan Pilpres ke depan, lebih baik. Pihaknya tidak mau hanya jadi sasaran kesalahan dalam kesemrawutan Daftar Pemilih Legislatif lalu.

"Tidak bisa kemudian KPU yang disalahkan semata-mata. Proses hingga diayahkan terjadinya DPT, melibatkan banyak pihak. Tidak hanya kemudian KPU yang menentukan DPT," ujarnya.

Meski demikian, dalam pelaksanaan Pilpres, ada perbaikan. Dan semakin banyak warga yang memiliki hak untuk memilih. Disamping partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemberian suara semakin meningkat.

(Ret/Jan)-b

PASCA PEMILU : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY di Jalan Ipda Tut Harsono, Yogya, pasca Pemilu berbeda dengan sebelumnya. Senin (13/4) kemarin, dipasang tulisan 'Tamu Harap Lapor' di pintu kaca yang dijaga petugas keamanan. Sebelumnya pintu itu selalu terbuka.

Dihatur:

1.
2.
3.
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai		
1. KPU	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi
2. Panwaslu	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Diabaikan	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.			
5.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005